



Isu-Isu Gender dalam Bimbingan dan Konseling Multibudaya: Pentingnya Peran Gender dan Cara Sosialisasi Gender Melalui Budaya (Studi Literatur)

Riza Melinda*, Bakhrudin All Habsy

Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

Email: 25011355029@mhs.unesa.ac.id*, bakhrudinhabsy@unesa.ac.id

Keywords:

gender; multicultural counseling;
guidance and counseling

Abstract

Gender issues in multicultural counseling are becoming increasingly important because the complexity of gender identity and differences in cultural values can trigger psychological stress, thus requiring counselors to be sensitive, inclusive, and able to create a safe space for clients. This research aims to examine gender issues in multicultural counseling and their implications for encouraging the development of more inclusive and effective counseling services for diverse clients. This research was compiled using a literature review approach, examining various theories, methods, and previous research findings related to gender issues in multicultural counseling. This review revealed several gaps in the research that remain largely unexplored. At the same time, this approach also helps to develop a more comprehensive understanding of how cultural diversity influences counseling practice. Interestingly, emerging findings suggest that a deep understanding of the relationship between culture and gender roles is no longer merely an add-on, but a primary need. Without it, counseling services risk bias and a lack of responsiveness. Therefore, multicultural counselors are required to have strong cultural awareness to see clients more holistically without becoming trapped by assumptions or stereotypes. Ultimately, when the approach used truly takes this complexity into account, multicultural counseling can be a space that not only helps individuals navigate gender issues, but also supports their psychological well-being more holistically amidst diverse social realities.

Kata Kunci:

gender; konseling multicultural;
bimbingan dan konseling

Abstrak

Isu gender dalam konseling multibudaya menjadi semakin penting karena kompleksitas identitas gender dan perbedaan nilai budaya dapat memicu tekanan psikologis, sehingga menuntut konselor untuk bersikap peka, inklusif, dan mampu menciptakan ruang aman bagi klien. Penelitian ini bertujuan mengkaji persoalan gender dalam konseling multibudaya serta implikasinya guna mendorong pengembangan layanan konseling yang lebih inklusif dan efektif bagi klien yang beragam. Penelitian ini disusun menggunakan pendekatan literature review, dengan menelaah berbagai teori, metode, serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan isu gender dalam konseling multibudaya. Dari proses penelusuran ini, terlihat bahwa masih ada celah-celah kajian yang belum banyak disentuh. Di saat yang sama, pendekatan ini juga membantu merumuskan pemahaman yang lebih utuh tentang bagaimana keberagaman budaya memengaruhi praktik konseling. Menariknya, temuan yang muncul menunjukkan bahwa pemahaman mendalam terhadap hubungan antara budaya dan peran gender bukan lagi sekadar tambahan, melainkan kebutuhan utama. Tanpa itu, layanan konseling berisiko bias dan kurang responsif. Karena itu, konselor multibudaya dituntut memiliki cultural awareness yang kuat, agar mampu melihat klien secara lebih utuh tanpa terjebak pada asumsi atau stereotip. Pada akhirnya, ketika pendekatan yang digunakan benar-benar

mempertimbangkan kompleksitas ini, konseling multibudaya bisa menjadi ruang yang tidak hanya membantu individu menghadapi persoalan gender, tetapi juga mendukung kesejahteraan psikologis mereka secara lebih menyeluruh di tengah realitas sosial yang beragam.

PENDAHULUAN

Isu gender dalam konseling multibudaya belakangan ini terasa semakin mengemuka dalam praktik bimbingan dan konseling. Dalam realitas masyarakat yang begitu beragam, memahami gender tidak lagi bisa dibatasi hanya pada kategori laki-laki dan perempuan. Ada spektrum identitas yang lebih luas, yang—kalau dicermati—sering kali dipengaruhi secara kuat oleh konteks budaya tempat individu itu tumbuh.

Situasi ini, mau tidak mau, menuntut konselor untuk tidak berhenti pada pemahaman yang bersifat umum atau normatif. Mereka perlu menggali lebih dalam bagaimana nilai-nilai budaya, kebiasaan sosial, hingga ekspektasi lingkungan membentuk cara klien memaknai dan mengekspresikan identitas gendernya. Tanpa sensitivitas semacam ini, proses konseling berisiko menjadi kaku, bahkan bisa saja mengabaikan pengalaman subjektif klien yang justru paling penting untuk dipahami.

Persoalan gender dalam konseling multibudaya terasa semakin relevan jika dilihat dari beragamnya norma sosial, harapan, dan stereotip yang hidup di tiap budaya (Dewi et al., 2024). Tidak semua masyarakat memberi ruang yang sama terhadap pilihan individu. Di beberapa konteks, peran gender masih dipandang secara kaku—seolah-olah sudah ada “pakem” tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Akibatnya, pilihan hidup, entah itu dalam pendidikan, karier, atau bahkan keputusan personal, sering kali ikut terbatas oleh ekspektasi sosial tersebut (Mufidah, 2021).

Ketika identitas gender seseorang tidak sejalan dengan norma yang berlaku, situasinya menjadi lebih rumit. Ada semacam tekanan yang pelan-pelan terakumulasi—bukan hanya dari lingkungan, tetapi juga dari pergulatan internal individu itu sendiri. Dalam banyak kasus, kondisi ini dapat memicu ketegangan emosional yang cukup signifikan. Rasa cemas, stres berkepanjangan, bahkan gejala depresi bisa muncul sebagai respons terhadap ketidaksesuaian tersebut (Adinata et al., 2025).

Di titik inilah pendekatan konseling tidak bisa lagi bersifat umum atau sekadar prosedural. Diperlukan sensitivitas yang lebih tajam terhadap isu gender, sekaligus pemahaman yang kontekstual terhadap latar budaya klien. Tanpa itu, ada risiko bahwa intervensi yang diberikan justru kurang tepat sasaran, atau bahkan tanpa disadari memperkuat bias yang sudah ada.

Lebih jauh, peran konselor dalam menghadapi isu gender sebenarnya tidak berhenti pada pemberian dukungan emosional saja. Ada lapisan lain yang perlu dipahami—cukup kompleks, bahkan. Konselor dituntut untuk melihat klien secara utuh, termasuk bagaimana lingkungan sosial dan budaya membentuk identitas serta pengalaman gender yang mereka jalani. Tanpa pemahaman semacam ini, sulit rasanya menciptakan ruang konseling yang benar-benar aman dan inklusif. Padahal, justru di ruang seperti itulah klien bisa merasa cukup nyaman untuk mengekspresikan dirinya tanpa bayang-bayang penolakan atau stigma.

Dalam lingkup pendidikan dan profesi bimbingan dan konseling, kemampuan memahami isu gender dalam konteks multibudaya bukan lagi sekadar nilai tambah, melainkan

kebutuhan yang cukup mendasar. Setiap klien datang dengan latar belakang yang berbeda, membawa nilai, keyakinan, dan pengalaman yang tidak selalu sama. Di sinilah pentingnya kepekaan konselor—bagaimana mereka membaca pengaruh budaya terhadap cara klien memaknai gender, lalu menerjemahkannya ke dalam layanan yang lebih relevan dan tepat sasaran (Depdiknas dalam Khowatim, 2020).

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa isu gender masih menjadi tantangan yang nyata dalam berbagai konteks sosial, termasuk pendidikan dan praktik konseling. Mufidah menunjukkan bahwa prasangka dapat muncul dalam praktik konseling multibudaya dan memengaruhi kualitas interaksi antara konselor dan klien. Khowatim menegaskan bahwa konselor memiliki peran penting dalam mewujudkan kesetaraan gender melalui layanan konseling multibudaya yang sensitif terhadap perbedaan. Absalom, Kaka, dan Tanhidy juga menyoroti bahwa persoalan kesetaraan gender di Indonesia masih dipengaruhi oleh budaya patriarkis yang kuat. Penelitian Astarina dkk. lebih lanjut menekankan perlunya keterlibatan konselor dalam merespons isu dan tantangan sosial yang berkaitan dengan gender. Temuan-temuan tersebut memperlihatkan bahwa gender dalam konseling multibudaya bukan sekadar isu tambahan, melainkan bagian penting yang harus dipahami secara serius.

Selain itu, proses sosialisasi gender yang berlangsung melalui keluarga, sekolah, kelompok bermain, dan kelompok sosial sekunder juga berperan besar dalam membentuk cara individu memaknai dirinya. Sejak usia dini, anak belajar mengenai apa yang dianggap pantas bagi laki-laki dan perempuan melalui interaksi sosial yang terus-menerus. Sosialisasi ini dapat membentuk identitas gender secara konstruktif, tetapi juga dapat memperkuat ketimpangan apabila norma yang ditanamkan bersifat diskriminatif atau membatasi potensi individu. Oleh karena itu, memahami sosialisasi gender melalui budaya menjadi penting dalam konteks konseling, karena masalah yang dihadapi klien sering kali berakar pada internalisasi nilai-nilai sosial tersebut.

Meskipun kajian tentang gender, budaya, dan konseling telah banyak dilakukan, masih terdapat kebutuhan untuk mengulas secara lebih sistematis hubungan antara isu gender, proses sosialisasi gender melalui budaya, dan implikasinya terhadap praktik bimbingan dan konseling multibudaya. Sebagian kajian lebih banyak menyoroti kesetaraan gender secara umum, sementara hubungan antara konstruksi budaya, pembentukan peran gender, dan kebutuhan intervensi konseling masih belum banyak dibahas secara terpadu. Oleh sebab itu, artikel ini memfokuskan perhatian pada pentingnya memahami gender sebagai hasil konstruksi budaya dan proses sosialisasi sosial, serta bagaimana pemahaman tersebut dapat memperkuat praktik konseling multibudaya.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini bertujuan untuk mengkaji isu-isu gender dalam bimbingan dan konseling multibudaya, khususnya yang berkaitan dengan pentingnya memahami peran gender dan proses sosialisasi gender melalui budaya. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dalam memperluas pemahaman mengenai keterkaitan antara gender, budaya, dan konseling, serta memberikan implikasi praktis bagi pengembangan layanan konseling yang lebih inklusif, sensitif, dan responsif terhadap keberagaman klien. Dengan demikian, konseling multibudaya dapat berfungsi tidak hanya sebagai sarana bantuan psikologis, tetapi juga sebagai ruang yang mendukung kesetaraan, penghargaan terhadap perbedaan, dan kesejahteraan individu di tengah realitas sosial yang beragam.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah tinjauan pustaka atau *literature review*. Secara sederhana, pendekatan ini tidak hanya berhenti pada kegiatan mengumpulkan referensi, tetapi juga melibatkan proses yang cukup mendalam—mulai dari menelusuri, membaca secara kritis, hingga mengevaluasi berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian (Bordens & Abbott, 2018). Dari situ, peneliti bisa mendapatkan gambaran yang lebih utuh mengenai perkembangan kajian yang sedang dibahas, termasuk arah temuan-temuan terbaru yang muncul di bidang tersebut.

Menariknya, melalui *literature review*, peneliti tidak sekadar merangkum apa yang sudah ada. Ada upaya untuk menelaah kembali teori dan metode yang telah dikembangkan sebelumnya, lalu—kalau memungkinkan—menemukan celah atau kesenjangan antara konsep teoritis dengan realitas di lapangan. Di titik ini, peluang untuk mengembangkan gagasan baru menjadi terbuka, atau setidaknya memberikan sudut pandang yang lebih segar terhadap isu yang diteliti (Bettany-Saltikov, 2012).

Dalam praktiknya, proses *literature review* biasanya berjalan melalui beberapa tahap yang saling berkaitan. Dimulai dari pengumpulan sumber data yang relevan, kemudian dilanjutkan dengan evaluasi terhadap kualitas dan kontribusi setiap literatur, hingga akhirnya masuk pada tahap analisis yang lebih mendalam. Sumber yang digunakan pun beragam, seperti buku dan artikel ilmiah, selama masih memiliki keterkaitan yang jelas dengan pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan sejak awal.

Lebih dekat, tinjauan pustaka sebenarnya memberi kontribusi yang cukup signifikan bagi peneliti, bukan hanya sebagai pelengkap, tetapi sebagai fondasi awal penelitian itu sendiri. Lewat proses ini, kemampuan peneliti dalam memahami topik yang dikaji menjadi lebih terlihat—bukan sekadar tahu, tetapi juga paham bagaimana topik tersebut dibahas dalam konteks akademik yang lebih luas.

Di sisi lain, tinjauan pustaka juga berperan dalam membantu menyusun kerangka teori dan menentukan pendekatan metodologis yang akan digunakan. Jadi, bukan hanya mengumpulkan referensi, melainkan menyaring dan menempatkannya secara strategis agar bisa mendukung arah penelitian. Dari sini, peneliti perlahan menempatkan dirinya sebagai bagian dari komunitas akademik, menunjukkan bahwa ia mengikuti alur berpikir ilmiah dan memahami standar penelitian yang sistematis.

Menariknya, manfaatnya tidak berhenti di situ. Tinjauan pustaka juga menjadi semacam “jembatan” antara penelitian yang dilakukan dengan publik yang lebih luas. Melalui kajian tersebut, pembaca dapat melihat urgensi penelitian, sekaligus memahami di mana letak kontribusinya—apakah mengisi kekosongan kajian sebelumnya, atau menawarkan cara pandang baru terhadap permasalahan yang sudah ada. Dengan kata lain, tinjauan pustaka membantu memperjelas posisi dan relevansi penelitian dalam lanskap keilmuan yang terus berkembang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Perkembangan Gender

Perkembangan gender mulai dikaji dari penelitian mengenai kelainan seksual serta perbedaan antara laki-laki dan perempuan pada pertengahan abad ke-20. Terdapat perdebatan pada awal penelitian ini, mengenai faktor bawaan (nature) dan pengaruh lingkungan (nurture), yang kemudian mendorong penggunaan istilah gender untuk membedakan antara jenis kelamin biologis yang diperoleh sejak lahir dengan jenis kelamin sosial yang terbentuk melalui konstruksi masyarakat.

Jika menelusuri perkembangannya, kajian tentang gender sejak sekitar tahun 1950-an hingga awal 2000-an menunjukkan pola yang cukup dinamis. Pada masa itu, perhatian para peneliti banyak tertuju pada beberapa tema kunci—mulai dari perbedaan gender, stereotip yang melekat dalam masyarakat, hingga pembentukan identitas gender. Selain itu, faktor biologis dan sosial juga mulai dipertimbangkan secara lebih serius sebagai elemen yang saling berinteraksi dalam membentuk perkembangan individu. Seiring waktu, fokus kajian ini tidak hanya bertambah luas, tetapi juga menjadi lebih reflektif dalam melihat bagaimana gender dipahami dalam konteks sosial dan budaya yang berbeda-beda.

Dicermati lebih jauh, perjalanan keilmuan ini tidak berlangsung secara linier. Pada fase awal, penelitian cenderung berangkat dari studi tentang kelainan seksual dan perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan. Pendekatan ini, meskipun masih terbatas, setidaknya memberikan pijakan awal bagi berkembangnya diskursus gender. Memasuki dekade-dekade berikutnya, kajian ini mulai bergerak lebih progresif. Berbagai teori besar bermunculan, membuka cara pandang baru yang kemudian menjadi dasar bagi pemahaman modern tentang gender.

Menariknya, menjelang akhir abad ke-20, perkembangan penelitian di bidang ini sempat melambat. Namun kondisi tersebut tidak berlangsung lama. Memasuki abad ke-21, minat terhadap kajian gender kembali meningkat, bahkan dengan pendekatan yang terasa lebih kritis dan metodologi yang jauh lebih berkembang. Di fase ini, banyak asumsi lama yang mulai dipertanyakan ulang—bukan untuk ditolak sepenuhnya, tetapi untuk diuji kembali dalam konteks yang lebih kompleks dan kontemporer.

Dari rangkaian perkembangan tersebut, terlihat bahwa kajian gender pada awalnya memang tidak secara spesifik diarahkan untuk memahami perilaku gender secara utuh. Banyak kontribusi justru datang dari berbagai disiplin ilmu, seperti biologi, sosiologi, hingga psikologi behaviorisme, yang secara tidak langsung membentuk fondasi awal bidang ini. Baru kemudian, seiring berjalannya waktu, kajian gender berkembang menjadi lebih terarah dan komprehensif. Pendekatannya pun semakin beragam, dengan metode penelitian yang lebih kritis dan akurat, sehingga mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai dinamika gender dalam kehidupan masyarakat (Ayriza, 2021).

B. Pengertian Gender

Menurut Umar (dalam Kibtyah, 2014), gender dapat dipahami sebagai konsep yang menjelaskan perbedaan antara laki-laki dan perempuan, tetapi bukan dari sisi biologis semata. Ada dimensi lain yang ikut bermain—sosial, budaya, bahkan psikologis—yang justru sering kali lebih menentukan bagaimana perbedaan itu dimaknai. Sejalan dengan itu, Fakih (dalam Kibtyah, 2014) melihat gender sebagai seperangkat sifat atau karakter yang dilekatkan pada laki-laki dan perempuan melalui proses konstruksi sosial dan budaya.

Jika melihat contoh yang sering muncul dalam kehidupan sehari-hari, perempuan kerap diasosiasikan dengan sifat lembut, penuh empati, atau keibuan. Sementara laki-laki lebih sering digambarkan sebagai sosok yang kuat, rasional, dan berwibawa. Namun, pembagian seperti ini sebenarnya tidak bersifat mutlak. Ada banyak situasi di mana laki-laki menunjukkan sisi lembut dan penuh perhatian, dan sebaliknya, tidak sedikit perempuan yang tampil tegas, rasional, bahkan sangat tangguh. Artinya, karakteristik tersebut tidak melekat secara kodrati, melainkan cukup lentur dan bisa berubah tergantung konteks.

Lebih jauh lagi, dalam perspektif sosiologi dan antropologi (dalam Rokhimah, 2014), gender dipahami sebagai pola perilaku sekaligus pembagian peran yang dibentuk oleh masyarakat pada periode tertentu. Jadi, apa yang dianggap “sesuai” bagi laki-laki atau perempuan di satu tempat belum tentu sama di tempat lain, bahkan bisa berubah seiring waktu. Dari sini terlihat bahwa gender pada dasarnya merupakan hasil dari kesepakatan sosial—dibentuk, dipertahankan, lalu perlahan bisa bergeser mengikuti dinamika budaya yang terus berkembang.

C. Kesetaraan Gender

Kesetaraan gender pada dasarnya merujuk pada kondisi ketika laki-laki dan perempuan berada pada posisi yang setara—bukan hanya secara formal, tetapi juga dalam praktik kehidupan sehari-hari. Keduanya memiliki peluang yang sama untuk mengembangkan potensi diri, mengambil keputusan, serta mewujudkan hak-haknya sebagai individu. Dalam konteks yang lebih luas, hal ini juga berarti adanya kesempatan yang seimbang untuk terlibat dan berkontribusi dalam berbagai bidang, mulai dari pembangunan nasional, politik, hingga ranah ekonomi, sosial, dan budaya.

Namun, kesetaraan ini tidak selalu hadir begitu saja. Ada proses panjang yang perlu dilalui. Dalam realitasnya, masih banyak situasi di mana akses dan partisipasi belum sepenuhnya merata. Di sinilah pentingnya keadilan gender—sebuah pendekatan yang, kalau dipahami lebih dalam, tidak sekadar menyamakan perlakuan, tetapi justru mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan yang berbeda pada tiap individu. Jadi, bukan berarti semua diperlakukan sama persis, melainkan diperlakukan secara adil agar hasil akhirnya benar-benar setara.

Ketika keadilan ini mulai terwujud, dampaknya terasa cukup signifikan. Laki-laki dan perempuan dapat berperan lebih aktif tanpa hambatan diskriminatif, sekaligus memiliki kesempatan yang sama untuk menikmati hasil dari berbagai proses pembangunan. Pada akhirnya, kondisi ini membuka ruang bagi terciptanya kehidupan sosial yang lebih seimbang—lingkungan yang tidak hanya inklusif, tetapi juga memberi tempat yang setara bagi setiap individu untuk berkembang.

D. Isu-isu Gender

Isu gender, meskipun sudah lama dibicarakan, tampaknya masih menjadi persoalan yang belum sepenuhnya terselesaikan dalam masyarakat modern. Ada banyak lapisan masalah yang saling berkaitan—bukan hanya di ranah sosial, tetapi juga merambah ke aspek ekonomi dan politik. Dalam beberapa kasus, kita masih bisa melihat adanya subordinasi, di mana satu gender diposisikan lebih rendah atau kurang bernilai dibanding yang lain. Situasi ini sering kali tidak berdiri sendiri, melainkan diperkuat oleh pola budaya yang sudah mengakar cukup lama.

Kekerasan terhadap perempuan juga menjadi persoalan yang sulit diabaikan. Bentuknya beragam, mulai dari fisik hingga psikologis, bahkan ekonomi. Jika ditelusuri lebih dalam, praktik ini kerap dipengaruhi oleh budaya patriarki yang masih kuat, ditambah dengan

perlindungan hukum yang belum sepenuhnya efektif. Di sisi lain, akses terhadap sumber daya penting—seperti pendidikan, layanan kesehatan, dan peluang kerja—masih belum merata. Ketimpangan ini pada akhirnya memperlebar jarak antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai sektor kehidupan.

Ada juga beban yang sering kali tidak terlihat secara langsung, tetapi cukup signifikan dampaknya: beban ganda. Banyak perempuan diharapkan mampu menjalankan peran domestik sekaligus aktif di ruang publik. Sekilas terlihat sebagai bentuk “kesempatan”, tetapi dalam praktiknya justru bisa membatasi ruang gerak dan pengembangan diri. Belum lagi persoalan lain seperti kekerasan seksual, stereotip negatif yang terus direproduksi, serta keterbatasan akses terhadap posisi kepemimpinan.

Memang, berbagai kebijakan telah dirancang untuk mengatasi persoalan ini. Namun, kalau dilihat dari realitas di lapangan, upaya tersebut masih memerlukan penguatan—baik dari sisi implementasi maupun kesadaran kolektif masyarakat. Tanpa itu, kesenjangan gender akan terus bertahan, dan cita-cita menuju masyarakat yang lebih adil mungkin akan berjalan lebih lambat dari yang diharapkan.

E. Isu-isu Kesetaraan Gender di Sekolah

Isu kesetaraan gender di Indonesia, kalau diamati lebih dekat, masih terus muncul dalam berbagai bentuk, terutama dalam konteks budaya yang beragam. Dalam banyak representasi sosial, laki-laki kerap diposisikan sebagai pemegang otoritas, sementara perempuan justru ditempatkan pada posisi yang lebih rendah atau kurang dihargai (Absalom dkk., 2022). Pola semacam ini tidak hanya berhenti pada tataran wacana, tetapi juga meresap ke dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam relasi rumah tangga.

Dalam situasi tertentu, khususnya ketika perempuan tidak memiliki kemandirian ekonomi, pilihan yang tersedia sering kali menjadi terbatas. Ada kecenderungan untuk bersikap pasrah—atau dalam istilah yang cukup akrab, “nrimo”—terhadap kondisi yang dihadapi. Sayangnya, keadaan ini bisa membuka ruang bagi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Yang lebih kompleks, tidak sedikit perempuan yang akhirnya memilih untuk tidak melaporkan kejadian tersebut, entah karena faktor ketergantungan, tekanan sosial, atau kekhawatiran akan stigma (Gultom, 2021).

Fenomena serupa juga dapat ditemukan dalam dunia pendidikan. Pandangan bahwa perempuan tidak perlu menempuh pendidikan tinggi masih saja terdengar, meskipun zaman telah berubah. Anggapan seperti “pada akhirnya akan kembali ke dapur” seolah menjadi pembenaran yang terus direproduksi di lingkungan tertentu (Maosuli dkk., 2025). Padahal, jika dilihat dari sudut pandang yang lebih luas, pendidikan justru menjadi salah satu kunci penting bagi perempuan untuk mengembangkan kapasitas diri.

Perempuan yang memiliki akses terhadap pendidikan tinggi tidak hanya memperoleh pengetahuan, tetapi juga memiliki peluang lebih besar untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Mereka cenderung lebih mandiri, memiliki daya tawar yang lebih kuat, serta mampu berperan aktif dalam keluarga maupun masyarakat. Bahkan dalam konteks keluarga, perempuan berpendidikan dapat berkontribusi signifikan dalam membimbing anak-anaknya, yang sering disebut sebagai “madrasah pertama” dalam kehidupan. Dengan demikian, pendidikan tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga membawa implikasi yang lebih luas bagi peningkatan martabat keluarga dan masyarakat secara keseluruhan (Tanashur dkk., 2023).

Meski berbagai upaya telah dilakukan—mulai dari edukasi mengenai hak-hak

perempuan hingga program pemberdayaan bagi kelompok yang terpinggirkan—realitasnya, jalan menuju kesetaraan gender di Indonesia masih belum sepenuhnya mulus. Ada sejumlah hambatan yang terus muncul dan, dalam beberapa kasus, justru terasa cukup mengakar. Norma budaya, pola pikir patriarkis, hingga cara tertentu dalam menafsirkan ajaran keagamaan sering kali menjadi faktor yang memperlambat perubahan. Di saat yang sama, persoalan seperti stereotip gender, subordinasi, marginalisasi, beban ganda, dan kekerasan masih terus berulang dan menjadi tantangan nyata yang belum sepenuhnya teratasi (Manalu dkk., 2024).

Diteliti lebih jauh, kunci untuk mengurangi ketimpangan ini tampaknya tidak bisa hanya bertumpu pada satu pendekatan saja. Dibutuhkan pemahaman yang lebih utuh mengenai konsep gender—bukan hanya di satu bidang, tetapi lintas sektor, mulai dari politik, sosial budaya, hingga ekonomi. Dengan pemahaman yang lebih komprehensif, arah kebijakan dan program yang dirancang bisa menjadi lebih tepat sasaran. Di sisi lain, peran para pengambil kebijakan juga tidak bisa diabaikan. Kapabilitas dalam merancang program yang responsif gender, ditambah dengan komitmen yang kuat dari pimpinan di tingkat institusi, menjadi faktor penting dalam mempercepat proses perubahan (Nurdin, 2024). Tanpa dukungan ini, berbagai inisiatif yang ada berisiko berjalan setengah hati.

Menariknya, institusi pendidikan justru memiliki posisi yang cukup strategis dalam konteks ini. Sekolah, misalnya, bukan hanya tempat transfer pengetahuan, tetapi juga ruang pembentukan nilai dan cara pandang. Kepala sekolah, guru mata pelajaran, konselor, hingga seluruh civitas akademika memiliki peran yang saling berkaitan dalam menanamkan prinsip kesetaraan gender. Dari ruang kelas yang sederhana itulah, sebenarnya perubahan yang lebih luas bisa mulai dibangun—pelan-pelan, tetapi berpotensi berdampak jangka panjang.

F. Sosialisasi Gender Melalui Budaya

Sosialisasi gender pada dasarnya merupakan proses panjang di mana individu perlahan belajar memahami dan membentuk konsep tentang gender melalui interaksi sosial yang mereka alami. Proses ini tidak terjadi secara instan. Ia tumbuh seiring waktu, ketika seseorang berinteraksi dengan berbagai agen sosialisasi—mulai dari keluarga, lingkungan sekitar, hingga institusi yang lebih luas seperti sekolah dan masyarakat (Neetu A. John dkk., 2017). Dari interaksi inilah, individu mulai menyerap nilai, norma, dan peran yang dianggap “sesuai” dengan gender tertentu.

Menariknya, sosialisasi gender bukan sekadar proses menerima, tetapi juga melibatkan pembentukan cara berpikir dan berperilaku. Individu belajar bagaimana menempatkan diri sesuai dengan identitas gender yang diakui dalam lingkungannya, meskipun dalam praktiknya hal ini tidak selalu berjalan mulus atau seragam. Dalam kajian yang lebih konseptual, Ryle (2011) menyebut sosialisasi gender sebagai bentuk pembelajaran sosial yang menghubungkan dua aspek penting, yakni norma gender dan identitas gender. Norma gender sendiri merujuk pada aturan atau ekspektasi yang mengatur bagaimana seseorang seharusnya bersikap—apa yang dianggap maskulin atau feminin dalam suatu budaya. Sementara itu, identitas gender lebih mengarah pada bagaimana individu memandang dan mendefinisikan dirinya sendiri (American Psychological Association, 2011).

Jika dilihat secara keseluruhan, sosialisasi gender merupakan proses yang bersifat multidimensi dan berlangsung terus-menerus. Tidak berhenti di satu fase kehidupan saja. Sepanjang hidupnya, individu terus berhadapan dengan berbagai nilai dan pengalaman baru yang, secara langsung atau tidak, memengaruhi cara mereka memahami gender. Dari situlah

identitas gender terbentuk—bukan sebagai sesuatu yang statis, tetapi sebagai hasil dari proses belajar yang terus berkembang seiring dinamika sosial yang dihadapi (Mansor, 2020).

a. Sosialisasi Gender Dalam Kelompok Primer

1. Keluarga

Menurut kajian yang dikemukakan oleh Bernard (dalam Soedarwo, 2010), perbedaan peran gender dalam masyarakat tidak muncul begitu saja, melainkan terbentuk melalui proses sosialisasi yang berlangsung sejak awal kehidupan, terutama di lingkungan keluarga sebagai kelompok primer. Di titik ini, keluarga menjadi ruang pertama tempat anak mengenal dunia—termasuk memahami nilai, norma, dan harapan yang secara perlahan membentuk cara mereka melihat diri sendiri maupun orang lain.

Kalau diamati dalam praktik sehari-hari, hampir setiap keluarga memiliki pola tertentu dalam memperlakukan anak laki-laki dan perempuan. Perbedaan ini kadang terasa halus, tetapi cukup konsisten. Anak laki-laki, misalnya, sering didorong untuk tampil kuat, berani, bahkan memiliki jiwa kepemimpinan. Sementara itu, anak perempuan cenderung diarahkan untuk bersikap lembut, penurut, dan lebih berhati-hati dalam mengekspresikan diri. Pola asuh semacam ini, disadari atau tidak, membentuk ekspektasi tentang bagaimana masing-masing gender “seharusnya” bersikap.

Melalui proses yang sering disebut sebagai pembelajaran gender, anak mulai mengenal konsep feminitas dan maskulinitas sejak usia dini. Dari sinilah mereka belajar menyesuaikan perilaku dengan peran yang dianggap sesuai oleh masyarakat. Namun, penting untuk disadari bahwa proses ini bukan sesuatu yang netral. Ia membawa nilai-nilai tertentu yang bisa saja memperkuat batasan-batasan peran gender, sekaligus memengaruhi bagaimana individu memaknai identitasnya di kemudian hari.

2. Pendidikan Formal dan Non Formal

Sebagai salah satu agen sosialisasi gender, sekolah sebenarnya memiliki peran yang cukup besar dalam membentuk cara pandang siswa terhadap peran laki-laki dan perempuan. Proses ini tidak selalu terlihat secara eksplisit, tetapi hadir melalui berbagai mekanisme, salah satunya lewat kurikulum formal. Dalam praktiknya, ada beberapa bentuk pembelajaran yang—kalau diperhatikan lebih saksama—masih memuat perbedaan perlakuan berbasis gender.

Misalnya, dalam mata pelajaran prakarya, beberapa sekolah masih memisahkan siswa dan siswi dengan materi yang berbeda. Siswi cenderung diarahkan pada keterampilan yang berkaitan dengan ranah domestik atau ekonomi rumah tangga. Sementara itu, dalam pelajaran olahraga, jenis aktivitas yang diajarkan pun bisa berbeda, seolah-olah ada batasan tidak tertulis tentang olahraga mana yang “cocok” untuk laki-laki dan perempuan.

Tidak hanya itu, representasi dalam buku teks juga turut berperan. Jika dicermati, beberapa buku pelajaran—seperti IPA—sering kali kurang menampilkan kontribusi ilmuwan perempuan. Hal serupa juga terlihat dalam buku olahraga atau kesehatan, yang lebih banyak menampilkan figur laki-laki sebagai representasi utama. Sekilas mungkin tampak sepele, tetapi pengulangan semacam ini bisa membentuk persepsi tentang siapa yang dianggap dominan dalam bidang tertentu.

Proses sosialisasi ini kemudian berlanjut pada tahap pemilihan jurusan. Ketika siswa mulai diarahkan ke bidang studi tertentu, ada kecenderungan bahwa siswi lebih banyak masuk ke bidang sosial dan humaniora, sedangkan siswa diarahkan ke bidang sains. Pola ini, yang terbentuk sejak pendidikan menengah, sering kali berlanjut hingga ke jenjang pendidikan

tinggi, bahkan memengaruhi pilihan karier di masa depan. Pada akhirnya, pola tersebut turut memperkuat pembagian peran gender dalam dunia akademik maupun profesional (Nuraida & Zaki, 2017).

3. Kelompok Bermain

Kelompok bermain, punya pengaruh yang tidak kecil dalam membentuk perilaku anak sejak usia dini—termasuk dalam hal bagaimana mereka memahami dan menjalani identitas gendernya. Proses ini sering berlangsung secara alami, tanpa disadari. Anak-anak cenderung memilih teman bermain yang sejenis, dan dari situ pola-pola tertentu mulai terbentuk. Misalnya, anak laki-laki lebih sering terlibat dalam permainan yang menonjolkan kompetisi, kekuatan fisik, atau keberanian. Di sisi lain, anak perempuan umumnya lebih akrab dengan aktivitas yang menekankan kerja sama dan interaksi sosial yang lebih halus.

Seiring bertambahnya usia, pola ini tidak serta-merta hilang, justru berkembang dalam bentuk yang lebih kompleks. Anak mulai belajar bagaimana berinteraksi dengan lawan jenis, tetapi pada saat yang sama juga menyerap ekspektasi sosial yang melekat pada masing-masing gender. Remaja laki-laki, misalnya, sering didorong untuk tampil lebih berani atau tegas, bahkan cenderung agresif dalam situasi tertentu. Sementara itu, remaja perempuan lebih sering diarahkan untuk menjaga sikap, menjadi lebih pasif, dan berhati-hati, terutama dalam relasi sosial seperti memilih pasangan.

Kelompok bermain tidak hanya berfungsi sebagai ruang interaksi, tetapi juga sebagai semacam “penjaga” norma sosial. Ada mekanisme tidak tertulis yang mengatur perilaku anggotanya. Anak laki-laki yang menunjukkan minat pada aktivitas yang dianggap feminin bisa saja menerima label negatif—bahkan dikucilkan. Hal serupa juga dialami anak perempuan yang cenderung menyukai aktivitas maskulin; mereka kerap diberi label tertentu seperti “tomboy.”

Dari sini terlihat bahwa kelompok bermain tidak hanya membantu membentuk peran gender, tetapi juga, secara halus, membatasi ruang gerak individu dalam mengekspresikan dirinya. Batasan ini sering kali terasa wajar karena sudah menjadi bagian dari dinamika sosial sehari-hari, padahal dampaknya bisa cukup panjang dalam membentuk cara individu memahami dirinya sendiri maupun orang lain.

b. Sosialisasi Gender Dalam Kelompok Sekunder

Kelompok sekunder, dalam hal ini, seperti komunitas olahraga, lingkungan kerja, atau organisasi formal menjadi ruang penting bagi berlangsungnya sosialisasi lanjutan, termasuk dalam hal pembentukan peran gender. Di tahap ini, individu tidak lagi hanya menyerap nilai dari keluarga atau lingkungan dekat, tetapi juga dari struktur sosial yang lebih luas. Menariknya, pola-pola yang terbentuk sebelumnya sering kali tetap terbawa, bahkan diperkuat dalam konteks yang lebih formal.

Dalam berbagai organisasi, misalnya, pembagian peran antara laki-laki dan perempuan masih terlihat cukup jelas. Posisi kepemimpinan cenderung lebih banyak diisi oleh laki-laki, sementara perempuan sering ditempatkan pada peran yang bersifat administratif. Di organisasi skala kecil, perempuan kerap diberi tanggung jawab sebagai sekretaris. Sementara dalam organisasi yang lebih besar, meskipun struktur lebih kompleks, pembagian ini tidak sepenuhnya berubah—perempuan masih sering diarahkan ke posisi seperti bendahara, yang meskipun penting, biasanya memiliki ruang pengambilan keputusan yang lebih terbatas.

Fenomena ini, kalau ditarik ke konsep klasik yang dikemukakan oleh Blood dan Wolfe

(1960), sebenarnya sudah lama dikenali. Dalam konteks rumah tangga, mereka menggambarkan perempuan sebagai “bookkeeper” dan laki-laki sebagai “boss.” Artinya, perempuan lebih banyak berperan dalam pengelolaan teknis, seperti pencatatan keuangan, sementara keputusan strategis tetap berada di tangan laki-laki. Pola ini, tampaknya, tidak hanya berhenti di ranah domestik, tetapi juga terbawa ke ruang-ruang sosial yang lebih luas.

Yang membuatnya semakin kompleks, pola pembagian peran ini terus direproduksi dari satu generasi ke generasi berikutnya. Ia menjadi semacam kebiasaan sosial yang terasa wajar, karena sudah terinternalisasi dalam kehidupan sehari-hari. Memang, perubahan mulai terlihat di beberapa sektor, tetapi pergeserannya cenderung berlangsung perlahan. Dalam prosesnya, masih ada berbagai tantangan yang perlu dihadapi sebelum tercapai kondisi yang benar-benar setara (Soedarwo, 2010).

G. Pengertian Konseling Multi Budaya

Konseling multibudaya pada dasarnya dapat dipahami sebagai proses interaksi antara konselor dan konseli yang berasal dari latar belakang budaya yang berbeda. Perbedaan ini tidak hanya terbatas pada etnis atau ras, tetapi juga mencakup aspek lain seperti gender, orientasi seksual, status sosial-ekonomi, hingga usia (Atkinson dkk. dalam Rahmawati et al., 2020). Dengan kata lain, situasi konseling tidak lagi berlangsung dalam konteks yang seragam, melainkan dalam ruang yang dipenuhi oleh keragaman pengalaman dan nilai.

Dalam kondisi seperti ini, efektivitas proses konseling sangat bergantung pada kemampuan konselor dalam membaca dan merespons perbedaan tersebut. Supriadi (2001) menekankan pentingnya kepekaan budaya—bukan sekadar memahami secara umum, tetapi juga mampu menghindari bias yang mungkin muncul dari sudut pandang pribadi konselor. Di titik ini, konselor dituntut untuk tidak hanya bersikap terbuka, tetapi juga aktif mengembangkan keterampilan yang sesuai dengan konteks budaya konseli. Jika tidak, bias yang tidak disadari justru bisa menjadi penghambat dalam proses konseling itu sendiri.

Menariknya, dalam praktiknya, konseling multibudaya sering dipandang sebagai sebuah *cultural encounter*—semacam pertemuan antara dua latar budaya yang berbeda. Dari pertemuan ini, konselor diharapkan mampu memahami perilaku manusia melalui dua pendekatan, yakni *etik* (yang bersifat universal) dan *emik* (yang spesifik pada budaya tertentu). Pendekatan ini membantu konselor untuk tidak terburu-buru menarik kesimpulan, melainkan melihat makna di balik perilaku atau komunikasi berdasarkan konteks budaya yang melatarbelakanginya.

Lebih jauh lagi, konseling multibudaya tidak hanya menjadi pendekatan alternatif, tetapi sudah berkembang menjadi kebutuhan mendasar dalam praktik bimbingan dan konseling. Peterson, Draguns, Lonner, dan Trimble (dalam Ulya et al., 2024) bahkan menegaskan bahwa kesadaran multibudaya bukan lagi sekadar nilai tambah, melainkan kompetensi inti yang harus dimiliki oleh setiap konselor. Tanpa itu, sulit rasanya memberikan layanan yang benar-benar relevan dan efektif bagi konseli yang datang dari latar belakang yang beragam.

H. Upaya Mewujudkan Kesetaraan Gender

Menurut pemikiran yang disampaikan dalam buku *Sosiologi Gender* karya Dalimoenthe (2021), upaya mewujudkan kesetaraan gender dalam praktik konseling sebenarnya tidak bisa dilakukan secara parsial. Ada beberapa langkah yang perlu dipahami secara lebih menyeluruh. Salah satunya adalah menanamkan cara pandang bahwa perbedaan antara laki-laki dan perempuan merupakan hal yang wajar—bukan untuk dipertentangkan, melainkan dihargai

sebagai bagian dari keberagaman manusia.

Di sisi lain, ada kebutuhan untuk mulai melihat kembali bagaimana struktur sosial bekerja. Kadang, tanpa disadari, sistem yang ada justru mempertahankan pembagian peran yang tidak seimbang. Karena itu, ruang diskusi menjadi penting, agar relasi antara laki-laki dan perempuan tidak lagi dibatasi oleh konstruksi yang kaku, tetapi lebih terbuka dan setara.

Aspek lain yang tidak kalah penting adalah memahami potensi individu secara lebih objektif. Melalui pengenalan minat, bakat, dan kemampuan, setiap orang—terlepas dari gendernya—memiliki peluang yang sama untuk berkembang, berkontribusi dalam masyarakat, serta mempersiapkan masa depan dengan lebih matang. Dalam konteks ini, isu Hak Asasi Manusia juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Hak-hak terkait gender perlu terus disuarakan, karena menyangkut prinsip dasar keadilan dan kemanusiaan.

Selain itu, upaya mendorong kesetaraan gender juga berkaitan erat dengan praktik demokrasi yang sehat. Keterlibatan perempuan dalam berbagai level pengambilan keputusan, baik di tingkat lokal maupun institusional, menjadi indikator penting dalam menciptakan sistem yang lebih inklusif.

Dan pada akhirnya, pendidikan tetap menjadi fondasi utama. Lewat pendidikan, individu tidak hanya memperoleh pengetahuan, tetapi juga belajar memahami norma, mengembangkan keterampilan, serta membangun cara berpikir yang lebih kritis terhadap isu-isu sosial, termasuk gender. Dari sinilah, perubahan yang lebih berkelanjutan sebenarnya bisa mulai tumbuh.

I. Peran Konselor Dalam Konseling Multi Budaya Terhadap Gender

Dalam konteks pengembangan potensi konselor pada bimbingan dan konseling multibudaya, peran yang dijalankan sebenarnya cukup kompleks—tidak hanya teknis, tetapi juga reflektif. Konselor dituntut untuk mampu menghadirkan layanan yang tidak sekadar efektif, melainkan juga inklusif dan peka terhadap keberagaman yang ada.

Salah satu peran yang cukup mendasar adalah membantu konseli menelaah kembali peran gender yang selama ini mereka yakini. Proses ini bukan sekadar mengidentifikasi, tetapi juga mengajak konseli memahami bagaimana peran tersebut memengaruhi pilihan hidup, relasi sosial, bahkan cara mereka memandang diri sendiri. Dari sini, konselor dapat membuka ruang diskusi yang lebih luas, dengan menghadirkan perspektif multibudaya yang mungkin sebelumnya tidak terpikirkan oleh konseli.

Di sisi lain, konselor juga perlu memiliki pijakan teoretik yang tidak bias gender. Artinya, pendekatan yang digunakan tidak memihak atau menguatkan stereotip tertentu, melainkan memberi ruang yang adil bagi setiap individu. Ini menuntut fleksibilitas—baik dalam memahami konteks budaya, berinteraksi dengan latar belakang yang beragam, maupun dalam menerapkan pendekatan yang relevan sepanjang rentang kehidupan konseli. Tanpa fleksibilitas ini, pendekatan konseling bisa terasa kaku dan kurang responsif terhadap kebutuhan nyata di lapangan.

Selain itu, pemahaman yang mendalam terhadap individu menjadi hal yang tidak bisa diabaikan. Konselor perlu melihat konseli secara utuh, termasuk faktor sosial, budaya, dan pengalaman personal yang membentuk perkembangan mereka. Dengan pemahaman seperti ini, intervensi yang diberikan tidak bersifat umum, tetapi lebih kontekstual dan sesuai dengan kebutuhan spesifik konseli.

Pada akhirnya, ketika ketiga peran ini dijalankan secara seimbang, konselor memiliki peluang lebih besar untuk menghadirkan layanan yang benar-benar bermakna. Bukan hanya

membantu konseli menyelesaikan masalah, tetapi juga mendukung mereka dalam memahami diri sendiri dan berkembang secara optimal di tengah lingkungan sosial yang beragam.

KESIMPULAN

Kesetaraan gender dalam konseling multibudaya bukan sekadar wacana tambahan, tetapi menjadi bagian yang cukup mendasar dalam upaya menciptakan layanan bimbingan yang adil dan inklusif. Dalam praktiknya, perbedaan nilai sosial dan budaya sering kali membentuk cara masyarakat memahami serta mendefinisikan peran gender. Di tengah kondisi seperti ini, posisi konselor menjadi cukup strategis bukan hanya sebagai pendamping, tetapi juga sebagai fasilitator yang membantu individu menavigasi berbagai tekanan yang muncul dari persinggungan antara identitas gender dan budaya. Kalau ditarik ke belakang, konsep gender sendiri telah mengalami pergeseran yang cukup signifikan. Ia tidak lagi dipahami semata-mata sebagai perbedaan biologis, melainkan sebagai konstruksi sosial yang dinamis, yang bisa berubah mengikuti konteks zaman dan budaya. Di sini, kesetaraan gender tidak cukup dimaknai sebagai pemberian hak yang sama antara laki-laki dan perempuan saja. Lebih dari itu, ada upaya untuk memastikan bahwa setiap individu—dengan latar belakang apa pun—memiliki kesempatan yang setara untuk berkembang, tanpa dibatasi oleh stereotip atau perlakuan diskriminatif.

Dalam situasi seperti ini, konselor multibudaya dituntut memiliki kepekaan yang lebih tajam. Mereka perlu menyadari bagaimana faktor sosial, budaya, dan gender saling berkelindan dalam membentuk pengalaman konseli. Tanpa kesadaran tersebut, bias—yang kadang muncul secara tidak disadari—bisa saja memengaruhi proses konseling. Sebaliknya, dengan pemahaman yang lebih reflektif, konselor dapat menciptakan ruang yang lebih terbuka dan inklusif, sekaligus membantu konseli memahami dan menghadapi tantangan yang mereka alami secara lebih konstruktif. Pada akhirnya, ketika pendekatan yang digunakan benar-benar mempertimbangkan kompleksitas ini, konseling multibudaya berpotensi menjadi sarana yang cukup efektif. Bukan hanya dalam mendukung kesetaraan gender, tetapi juga dalam meningkatkan kesejahteraan psikologis individu di tengah realitas masyarakat yang semakin beragam.

REFERENSI

- Absalom, L. K., Kaka, B., & Tanhidy, J. (2022). Menyikapi isu kesetaraan gender di Indonesia dalam perspektif *imago Dei*. *Jurnal Kala Nea*, 3(1), 1–15. <https://doi.org/10.61295/kalanea.v3i1.88>
- Adinata, F., Wahidin, M., Nitami, M., Situngkir, D., Putri, E. C., & Utami, D. (2025). Studi deskriptif depresi, kecemasan, dan stres pada pekerja bagian finishing PT. X tahun 2025. *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara*, 1(9), 104–112.
- Astarina, D., Sari, P. N., Nurhayati, M., Pidi, N. R., & Khusumadewi, A. (2025). Mewujudkan kesetaraan gender dalam konseling multibudaya: Peran konselor dalam berpartisipasi isu dan tantangan sosial. 8(1).
- Ayriza, Y. (2021). *Perkembangan gender anak dalam perspektif psikologi*. Remaja Rosdakarya.
- Dalimoenthe, I. (2021). *Sosiologi gender*. Bumi Aksara.
- Dewi, R., Harmi, H., & Fadila, F. (2024). *Pelaksanaan konseling lintas budaya dalam mengatasi masalah multikultural siswa di sekolah (Studi eksperimen di SMK Negeri 5 Kepahiang)*. Institut Agama Islam Negeri Curup.
- Gultom, M. (2021). Indikator kesetaraan gender dan isu-isu gender di bidang pendidikan. 2(1).
- Hibatulloh, F. I. (2022). *Analisis gender Longwe pada program desa perempuan Indonesia maju mandiri di Desa Summersari Kabupaten Sleman*.
- Khowatim, K. (2020). Peran konselor dalam konseling multibudaya untuk mewujudkan kesetaraan gender. *Jurnal Bikotetik (Bimbingan dan Konseling: Teori dan Praktik)*, 4(1), 10–15.
- Kibtyah, M. (2014). Peran konseling keluarga dalam menghadapi gender dengan segala permasalahannya. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 9(2), 361–380.
- Manalu, Y., Simatupang, R. H., & Silaen, C. F. (2024a). Kesetaraan gender dalam bingkai kebinekaan Indonesia. *Journal of Law and Social Society*, 1(1), 27–40. <https://doi.org/10.70656/jolasos.v1i1.81>
- Mansor, N. A. (2020). Perbezaan sosialisasi gender dalam ruang lingkup budaya. *Rabbianica: Journal of Revealed Knowledge*, 1(1), 107–118.
- Maosuli, S., Aini, N., Amanda, R. S., & Kurnia, A. (n.d.). Peningkatan kesadaran kesetaraan gender berbasis nilai-nilai Islam di lingkungan sekolah melalui kegiatan edukatif. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*.
- Mufidah, E. F. (2021). Studi kasus prasangka dalam praktik konseling multibudaya mahasiswa BK. *Jurnal Fokus Konseling*, 7(2), 62–68.
- Nuraida, N., & Zaki, M. (2017). Pola komunikasi gender dalam keluarga. *Wardah*, 18(2), 181–200.
- Nurdin, N. (2024). Memahami isu gender dan ketidaksetaraan gender di Indonesia pasca era reformasi: Perspektif pembangunan. *Jurnal Ilmiah Global Education*, 5(1), 332–343. <https://doi.org/10.55681/jige.v5i1.2239>
- Rahmawati, R., Afiati, E., & Wibowo, B. Y. (2020). *Buku ajar bimbingan dan konseling multibudaya*. Media Edukasi Indonesia.
- Rokhimah, S. (2014). Patriarkhisme dan ketidakadilan gender. *Muwazah*, 6(1), 132–145.
- Soedarwo, V. S. D. (2010). *Pengertian gender dan sosialisasi gender*. Universitas Terbuka.
- Tanashur, P., Widhi, B. A., Miswaty, T. C., & Alawiyah, R. (2023). Kesetaraan gender dalam

pendidikan: Peran proyek pengabdian masyarakat dalam menciptakan kesempatan yang adil.

Ulya, M., Nida, I. F., & El Husna, A. Z. (2024). Toleransi perbedaan aliran gerakan dakwah di suatu keluarga dalam perspektif konseling multibudaya. *At-Taujih: Bimbingan dan Konseling Islam*, 7(2), 62–69.